

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Bselakang Masalah

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial” (Mardiono, 2005). Dalam kontruksi APBD, belanja pemerintah daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan daerah, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah daerah dalam operasi fisik pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian.

Dalam perencanaan anggaran dapat juga didefininikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, didalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian serta menentukan arah untuk mencapainya.

Dalam kaitannya dengan belanja daerah, terdapat dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu kebijakan belanja (*expenditure policy*) dan menejemen belanja (*expenditure managemenet*). Kebijakan belanja terkait dengan penentuan “apa yang akan dilakukan” yang berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja, sedangkan manajemen belanja terkait dengan “bagaimana melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas ekonomis, efisien, dan efektif.” Kebijakan belanja daerah ditentukan paada tahap perencaan anggaran, sedangkan manajemen belanja daerah dilakukan pada tahap implementasi anggaran.

Dalam lingkup publik biasanya masyarakat seringkali melihat suatu keberhasilan pemerintah dilihat dari adanya pembangunan secara fisik yang mana pertama kali

dilihat adalah anggaran keuangan pemerintah daerah. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menetapkan tentang tata kelola keuangan daerah agar tercapai tingkat yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan belanja daerah.

Tabel 1.1

**Persentase Serapan Anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung TA 2013-2017**

Anggaran	Realisasi	Presentase Serapan	Tahun
Rp. 45.593.454.338	Rp. 37.489.300.241	69,89%.	2017
Rp. 81,287,900,075	Rp. 42,274,625,169	91.74%	2016
Rp. 47,130,327,075	Rp. 31,275,834,553	83.10%	2015
Rp. 12,837,155,500	Rp. 10,412,608,905	82.96%	2014
Rp. 17,981,944,300	Rp. 11,844,781,658	88.05%	2013

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (Portal Data Kota Bandung : Data Serapan Anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013-2017)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa presentase serapan anggaran dari tahun 2013-2017 belum stabil, terjadinya penurunan dan kenaikan dalam presentase penyerapan anggaran. Dimana pada tahun 2013 presentase serapan anggaran mengalami peningkatan presentase yaitu 88,05%. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 82,96%. Kemudian pada tahun 2015 realisasi serapan anggaran mengalami peningkatan sebesar 83,10% terus meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 91,74% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 69,89%.

Melihat fenomena yang terjadi, penurunan angka serapan pada tahun 2017 yang mencapai 69,89% jauh dari angka minimum pencapaian dan sangat erat kaitannya antara pencapaian dengan perencanaan.

Tabel 1.2
Capaian Kegiatan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung 2017

N O	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rp 14,216,362,629	Rp 12,126,266,961	85.3 0
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp 12,209,217,168	Rp 11,840,947,740	96.9 8
3	Kegiatan Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung	Rp 3,263,529,536	Rp 1,952,654,880	59.8 3
4	Kegiatan Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan	Rp 1,899,545,431	Rp 1,265,808,795	66.6 4
5	Kegiatan Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	Rp 1,665,924,640	Rp 1,337,259,000	80.2 7
6	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan	Rp 1,203,712,620	Rp 1,056,228,625	87.7 5

	Kejadian Luar Biasa			
7	Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya	Rp 1,014,284,600	Rp 844,575,100	83.2 7
8	Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Rp 952,619,541	Rp 320,144,330	33.6 1
9	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 811,386,800	Rp 714,927,800	88.1 1
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak	Rp 810,370,000	Rp 649,687,810	80.1 7
10	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rp 787,728,800	Rp 644,269,600	81.7 9
11	Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Rp 673,941,600	Rp 541,757,160	80.3 9
12	Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	Rp 662,225,200	Rp 612,820,700	92.5 4
13	Penertiban Dan Pengawasan Undian Dan Sumbangan Sosial	Rp 628,826,700	Rp 262,364,000	41.7 2
14	Kegiatan Pelatihan Keterampilan	Rp 526,894,500	Rp 493,608,150	

	Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar			93.6 8
15	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Rp 510,364,500	Rp 286,770,500	56.1 9
16	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	Rp 507,606,593	Rp439,581,660	86.6 0
17	Kegiatan Pelaksanaan Kie Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 401,994,800	Rp 332,428,650	82.6 9
18	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Rp 374,367,840	Rp 92,805,500	24.7 9
19	Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling	Rp 362,749,500	Rp 354,592,500	97.7 5
20	Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rp 356,392,040	Rp 295,944,750	83.0 4
21	Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak	Rp 288,387,240	Rp 250,417,000	86.8 3
22	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih Dan Pendidik	Rp 232,067,800	Rp 188,346,000	81.1 6
23	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek	Rp 227,710,250	Rp 940	

	Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah			-
24	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 222,928,760	Rp 219,559,440	98.4 9
25	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Rp 210,376,850	Rp 178,285,650	84.7 5
26	Pendataan Dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR)	Rp 179,239,000	Rp 43,450,000	24.2 4
27	Kegiatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan Dan Anak	Rp 117,321,200	Rp -	-
28	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih Dan Pendidik	Rp 105,725,000	Rp 95,372,000	90.2 1
29	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp 101,926,000	Rp 26,910,000	26.4 0
30	Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp 54,505,200	Rp 17,400,000	31.9 2
31	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Rp 6,930,000	Rp 4,115,000	59.3 8
31	Kegiatan Persiapan Dan Penetapan	Rp 6,292,000	Rp -	-

	Sertifikasi ISO 9001-2000			
		Rp	Rp	69.8
	JUMLAH	45,593,454,338	37,489,300,241	9

Dataset: Data Serapan Anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017 (data tabel diolah Peneliti)

Salah satu pembahasan yang terkait anggaran adalah realisasi anggaran yang mana menjadi tolak ukur perencanaan anggaran itu sendiri, dimana perkembangan realisasi penyerapan anggaran dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer, dan pelaksanaan program kegiatan di daerah, sehingga dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, salah satunya adalah memberikan proporsi pada belanja yang bersifat investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 1.3

Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Presentase

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase Serapan
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar remaja putus sekolah	Rp 227,710,250	Rp 940	-
Kegiatan pelayanan dan perlindungan social, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan	Rp 117,321,200	Rp -	-

perempuan dan anak.			
Kegiatan persiapan dan penetapan sertifikasi ISO 9001-2000	Rp 6,292,000	Rp -	-

(Dataset: Data Serapan Anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017) (data tabel diolah Peneliti)

Dilihat dari tabel 1.2 diatas ada beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksanakan, mulai dari kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah, kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, pergadangan perempuan dan anak, kegiatan persiapan dan penetapan sertifikasi ISO 9001-2000. Dari adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana maka terjadinya pengangguran dalam anggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penjelasan dan data yang telah diperoleh oleh peneliti pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Maka peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang “**Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, peniliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Rendahnya realisasi anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2017.
2. Adanya beberapa program atau kegiatan yang tidak terlealisasikan sehingga terjadinya pengangguran anggaran.

3. Kurang efektifnya perencanaan anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dilihat dari beberapa kegiatan yang jauh dari angka pencapaian minimum

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian dari identifikasi masalah, maka fokus penelitian dirumuskan dalam masalah berikut :

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Seberapa Besar Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan ini adalah :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Seberapa Besar Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori akuntansi sektor publik. Dapat memahami secara teoritis sekaligus mengamati juga keuangan yang ada di pemerintahan khususnya mengenai Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

- b) Penelitian secara teoritis juga untuk memberi landasan bagi para peneliti yang lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori khususnya mengenai anggaran sektor publik yang ada dalam instansi pemerintahan di berbagai daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan mampu memahami keuangan pemerintahan secara lebih mendalam agar dapat berperan aktif dalam mengamati keuangan negara yang sebesar-besarnya harus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
- b) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tentang upaya peningkatan perencanaan anggaran di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- c) Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang membutuhkan.
- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Instansi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perencanaan anggaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Selain itu, dapat meningkatkan terjalannya kerjasama dengan Instansi pemerintahan.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Syafri (2012: 25) Administrasi Publik adalah proses kerjasama kelompok orang dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efisien dan berkeadilan sosial.

Menurut Anggara (2016: 11) Keuangan Negara dapat didefinisikan sebagai berikut: “Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, Yayasan maupun institusi lainnya”.

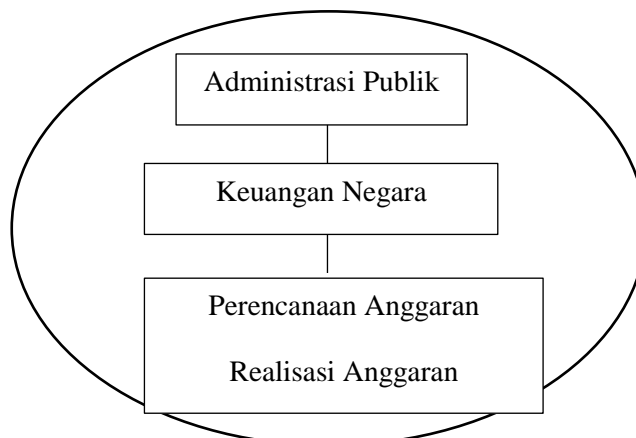
Menurut Fattah (2006: 47) Perencanaan anggaran adalah suatu rencana operasi dari suatu kegiatan yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan.

Menurut Munandar (2012) Realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan dari realisasi anggaran ini untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bias berjalan lebih baik lagi.

Dalam kerangka pemikiran ini menggunakan teori keuangan Negara sebagai grand theory, teori kinerja keuangan sebagai middle theory, dan teori realisasi anggaran sebagai operasional teori.

Gambar 1.1

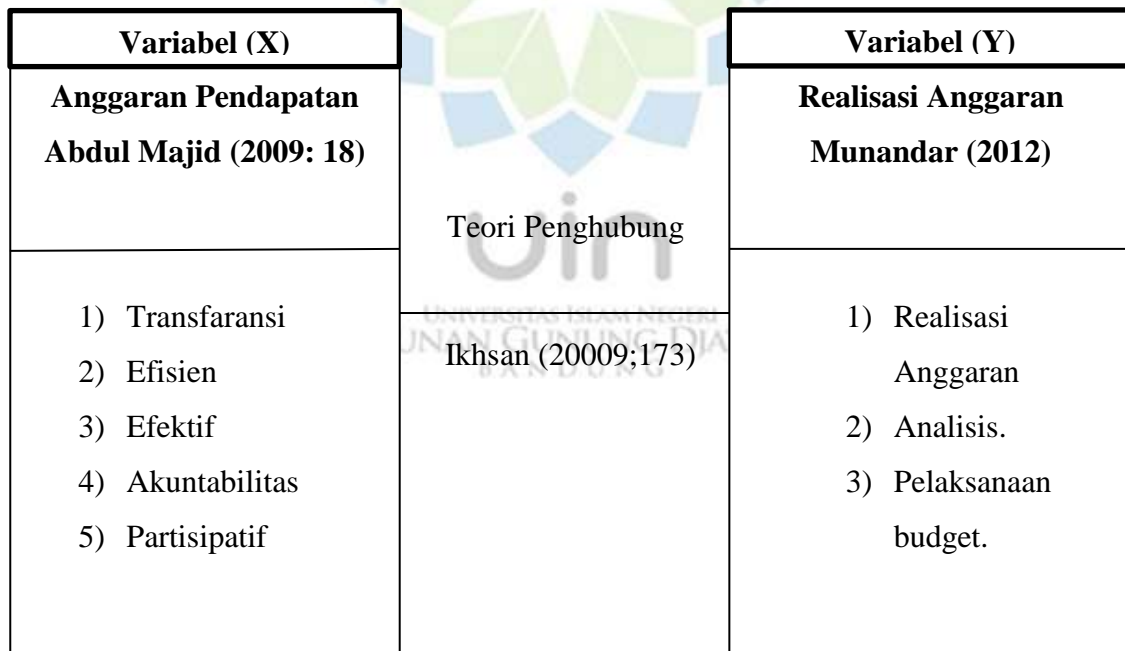
Kerangka Konseptual



(data diolah oleh peneliti 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang dinyatakan dengan rasio efisiensi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



(Data diolah peneliti 2019)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa focus penelitian ini adalah meneliti ada atau tidaknya Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap realisasi Anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang dinyatakan dengan rasio efisiensi. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap realisasi anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

G. Hipotesis

Adapun hipotesis variabel yaitu Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap variabel Realisasi (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengelolaan perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengelolaan perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

